

Diplomasi

BULETIN KERJA SAMA LUAR NEGERI

KEMENTERIAN PERTANIAN

Pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian, Istana Kepresidenan Bogor, 14 Agustus 2021



Presiden RI pada Pembukaan Pelepasan Ekspor Komoditas Pertanian (14/08/2021)

10

Courtesy Meeting
Dubes RRT

Dorong Akses Pasar dan Kerja
Sama Pertanian Melalui MoU

14

Anggota Dewan
FAO

Indonesia Kembali Menjadi
Anggota FAO Council Periode
2021-2024

18

APEC MM on
Food Security

Komitmen Indonesia
Tindaklanjuti Roadmap
Ketahanan Pangan 2030

DAFTAR ISI

PAGE 1

PENGANTAR

PAGE 2-3

MERDEKA EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN

PAGE 4 - 27

FASILITASI AKSES PASAR DAN KERJA SAMA TEKNIS

- 4-5 **INDIA** Courtesy Meeting dengan Dubes India
- 6-7 **RUSIA** Sepakat Tingkatkan Kerja Sama, Akses Pasar dan Investasi
- 8 **RUMANIA** Sepakat Inisiasi Kerja Sama Rekayasa Cuaca Sektor Pertanian
- 9 **UNI EROPA** Perkuat Kerja Sama Pertanian dengan Indonesia
- 10-11 **RRT** Mentan RI Dorong Akses Pasar serta Kerja Sama Pertanian melalui MoU
- 12 **GULF NEWS** Interview Mentan & Courtesy dengan Dubes RI untuk Qatar
- 13 **UNFSS** Mentan RI Prioritaskan Sistem Pangan Berkelanjutan
- 14-15 **FAO** Indonesia Terpilih Kembali sebagai Dewan FAO Periode 2021 - 2024 & Komitmen Konkret FAO dalam Mendukung Presidensi G20 Indonesia
- 16 **CHILE** Pertemuan Wamentan RI dengan WamenLN Perdagangan Chile
- 17 **ASIA PALM OIL** Interview dengan Sekjen Kementan RI
- 18-19 **APEC** Rangkaian Pertemuan selama periode Mei - Agustus 2021
- 20 **ASEAN** Peningkatan Daya Saing Kawasan melalui JCM ASEAN
- 21 **G20** Agriculture Deputies Meeting ke-2 Presidensi Italia Tahun 2021
- 22-23 **PHLN** Rencana Percepatan On-going Project PHLN di Era Pandemi COVID-19 & Dukungan JICA untuk Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian di Jabar
- 24-25 **BRIEF UPDATE** Penguatan Akses Pasar dengan Negara Mitra
- 26-27 **BRIEF UPDATE** Penguatan Kerja Sama Teknis dengan Negara Mitra

PAGE 28 - 33

HIGHLIGHTS

PAGE 34 - 35

KEGIATAN BIRO KLN

PAGE 36

AGENDA



Pengantar

Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan kerja sama internasional untuk memperluas akses pasar global bagi komoditas pertanian Indonesia serta mendorong mobilisasi bantuan teknis dan investasi di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

Sepanjang kuartal II tahun 2021, Menteri Pertanian melakukan *courtesy meeting* dengan lima duta besar dan delegasi dari negara mitra serta berperan aktif menjadi panelis pada Sidang Pre-Summit UN Food Systems dan Konferensi FAO. Melalui pertemuan dengan Duta Besar Rusia, telah diupayakan percepatan finalisasi *memorandum of understanding* bidang pertanian dan disepakati penguatan komitmen kerja sama sektor pertanian melalui penandatanganan *letter of intent*.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang terangkum dalam Buletin Diplomasi edisi IX/2021, diharapkan dapat memberi kontribusi dalam usaha mencapai pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern.



Dr. Ade Candradijaya
Kepala Biro Kerja Sama
Luar Negeri

Tim Redaksi

Pengarah: Dr. Ade Candradijaya **Penanggungjawab:** Seta Rukmalasari Agustina **Editor:** Yurika A. Permanasari **Anggota:** Rd. Dedy S. | Isna Helmi Y. | Ratu Putri R. | Reynaldi Elmir A., M. | Zaeni Tasripin | Rina Puspitasari | Huda Mahmuda | Annisa Handayani | Listyaningsih | **Email:** publikasi.kln@gmail.com, **Facebook:** KLN Pertanian

MERDEKA KOMODITAS

Sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi, Kementerian Pertanian menginisiasi kegiatan Merdeka Ekspor yang dilakukan di 17 pintu utama yang tersebar di 17 Provinsi Indonesia dengan total devisa mencapai lebih dari Rp. 7 triliun. Kegiatan Merdeka Ekspor dilakukan selama 7 hari dan dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dari Istana Bogor pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021.

Presiden Jokowi mengapresiasi kegiatan Merdeka Ekspor mengingat sektor pertanian terbukti sebagai sektor yang tangguh dan mampu bertahan dari krisis pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor produk pertanian pada tahun 2020 mencapai Rp. 451,8 triliun atau meningkat 15,79 persen jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp. 390,6 triliun. Lebih spesifik Presiden menyampaikan capaian nilai ekspor pertanian pada semester pertama tahun 2021 (Januari-Juli) mengalami peningkatan mencapai Rp. 282,86 triliun atau naik 14,05 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp. 202,05 triliun.

Peningkatan ekspor pertanian dinilai cukup memuaskan karena berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Dalam hal ini, angka Nilai Tukar Petani (NTP) nasional sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani secara konsisten terus mengalami perbaikan. NTP pada Juni 2020 mencapai 99,60 dan terus meningkat sebesar 103,25 pada Desember 2020 dan mencapai 103,59 pada Juni 2021.

Presiden juga menekankan agar semua pihak dapat turut bekerja sama dalam meningkatkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi.

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengatakan Merdeka Ekspor merupakan bentuk konkrit kinerja Kementerian Pertanian selama dua tahun, khususnya dalam konteks pandemi, sekaligus untuk memperingati dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke-76.

"Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa investasi dan ekspor merupakan faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, kami terus berupaya mendorong ekspor produk pertanian ke berbagai negara," ujar Mentan.

Mentan menjelaskan, kegiatan Merdeka Ekspor merupakan implementasi dari berbagai program strategis, termasuk program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) untuk mempercepat ekspor produk pertanian, serta menggerakkan provinsi, kabupaten dan kota untuk mengakselerasi ekspor.

Total ekspor yang dilepas pada kegiatan Merdeka Ekspor sebesar 627.399 ton dengan nilai Rp. 7,29 triliun meliputi komoditas perkebunan 564.550 ton, tanaman pangan 4.277 ton, hortikultura 7.230 ton, peternakan 4.013 ton, dan komoditas lainnya. Negara tujuan utama adalah Tiongkok, AS, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, UEA, Pakistan dan negara lainnya sejumlah 61 negara.

"Kami juga mendorong lebih cepat ekspor produk pertanian seperti porang, sarang burung walet, lipan, maggot serta komoditas potensial ekspor lainnya," kata Mentan.

Kegiatan Merdeka Ekspor diharapkan memberikan semangat dan motivasi bagi para pelaku pembangunan pertanian, khususnya petani.



EKSPOR PERTANIAN



INDONESIA TANGGUH
INDONESIA TUMBUH

EKSPOR

627.399 ton
Rp. 7.29 triliun

Perkebunan
564.550 ton
Tanaman Pangan
4.277 ton
Hortikultura
7.230 ton
Peternakan
4.013 ton

Negara Tujuan Ekspor

	RRT		MAL
	AS		ING
	INDIA		JER
	JPN		RUS
	KORSEL		UEA
	THAI		PAK

na Kepresidenan Bogor, 14 Agustus 2021



na Kepresidenan Bogor, 14 Agustus 2021



na Kepresidenan Bogor, 14 Agustus 2021



INDONESIA

Jakarta

17

Lokasi Pintu Pelepasan Ekspor

- (1) Pelabuhan Laut Tanjung Priok (Rp. 435,1 mil)
- (2) Bandar Udara Soekarno Hatta (Rp 40,36 mil)
- (3) Pelabuhan Laut Tanjung Perak (Rp. 1,3 tril)
- (4) Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang (Rp. 400,57 mil)
- (5) Pelabuhan Laut Belawan Medan (Rp. 431,6 mil)
- (6) Pelabuhan Laut Makassar New Port
- (7) Pelabuhan Laut Jetty Balikpapan
- (8) Pelabuhan Laut Dumai (Rp 1 tril)
- (9) Pelabuhan Laut Panjang Lampung
- (10) Pelabuhan Sungai Boom Baru Palembang
- (11) Bandar Udara Hang Nadim
- (12) Pelabuhan Laut Trikora Banjarmasin
- (13) Pelabuhan Laut Talang Duku Jambi
- (14) Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak (194,31 mil)
- (15) Pelabuhan Laut Bitung Manado
- (16) Pelabuhan Laut Batu Ampar Batam
- (17) Pelabuhan Laut Teluk Bayur Padang

FASILITASI AKSES PASAR DAN KERJA SAMA INVESTASI



Pertemuan Menteri Pertanian RI dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Y.M. Manoj K. Bharti (22/6/21)

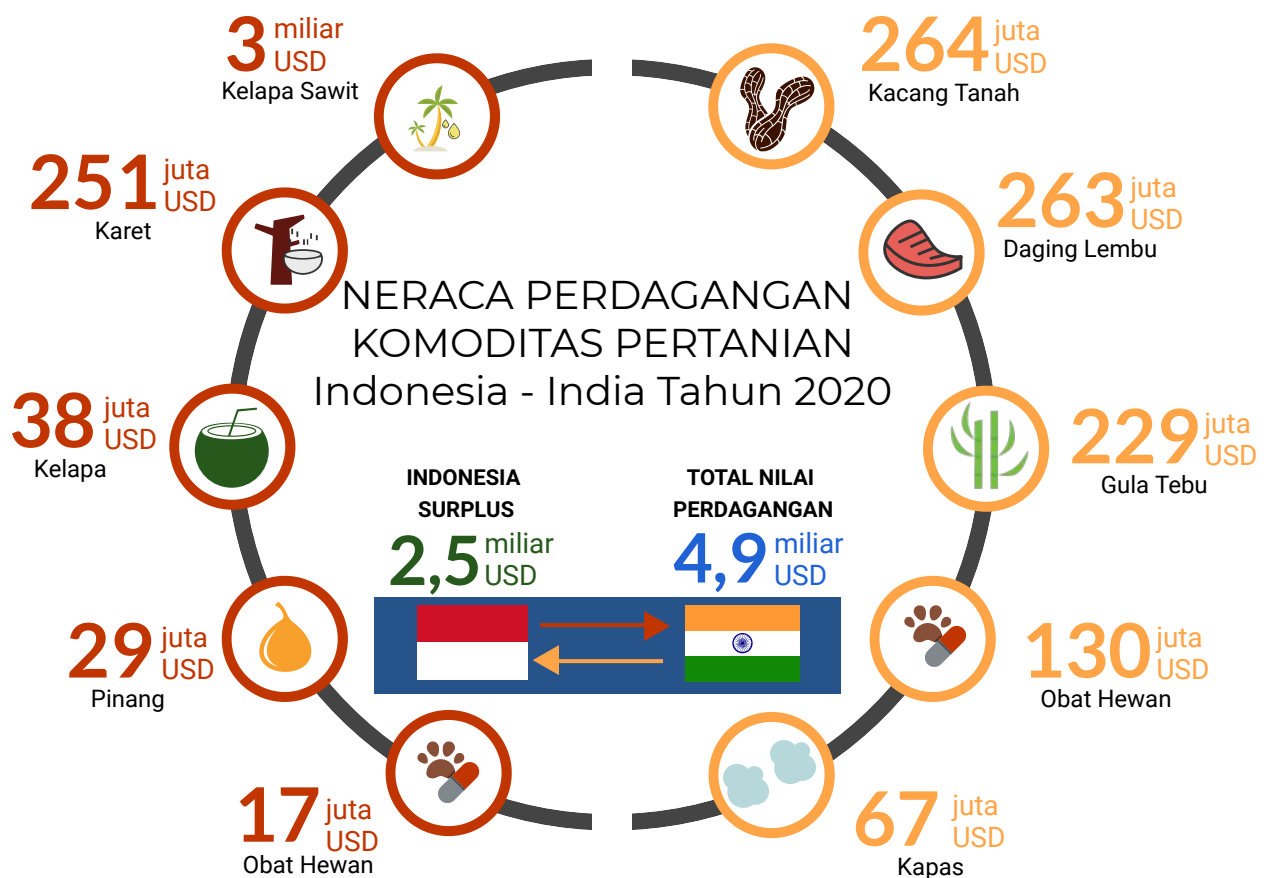
Courtesy Meeting Dubes India dengan Menteri Pertanian RI

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) Duta Besar India untuk Indonesia, Y.M. Manoj K. Bharti, pada 22 Juni 2021, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian mengapresiasi hubungan baik antara kedua negara di sektor pertanian. Hubungan bilateral Indonesia dan India telah dipayungi oleh *Memorandum of Understanding in Agriculture* yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI dan Menteri Pertanian India pada tahun 2008. Kedua pihak sedang melakukan pembahasan untuk memperbarui MoU untuk memperkuat komitmen kedua pihak dalam bidang pertanian. Secara khusus, kedua negara juga telah membentuk kerja sama teknis melalui kerangka *Joint Working Group on Agriculture* (JWGA).

Kerja sama JWGA Indonesia - India mencakup penguatan kerja sama bidang akses pasar, peternakan, penyuluhan dan pertukaran plasma genetik. Mentan berharap forum JWGA Indonesia - India dapat dioptimalkan bersama oleh kedua negara, khususnya untuk merumuskan kerja sama konkret di tingkat teknis ke depan.

Dubes India menyampaikan bahwa penggunaan teknologi pertanian dan diseminasi ke seluruh wilayah Indonesia merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Selain itu, Dubes India juga mengapresiasi pencapaian Indonesia sebagai anggota Dewan (*Council*) Badan Pangan dan Pertanian PBB (*Food and Agriculture Organization/FAO*) pada rangkaian pertemuan *FAO Conference ke-42*, yang diadakan secara daring pada 14-18 Juni 2021.



Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan FAO merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap kontribusi Indonesia dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, nutrisi, dan pembangunan pertanian berkelanjutan pada tataran global, terutama dalam kerangka FAO. Melalui keanggotaan pada Dewan FAO, Indonesia dapat berkontribusi dalam perumusan berbagai kebijakan FAO yang mendukung upaya negara anggota PBB mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 2 (menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan).

Lebih lanjut, Mentan menyampaikan bahwa perdagangan pertanian Indonesia dan India telah mencapai perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan data Kementan, hingga tahun 2020, nilai perdagangan komoditas kedua negara mencapai USD 2,5 milyar, yang didominasi oleh komoditas perkebunan.

Dalam kesempatan tersebut, melalui Duta Besar, Mentan mengharapkan bantuan Pemerintah India untuk membantu memfasilitasi peningkatan perdagangan komoditas lainnya di pasar India, seperti buah tropis yang menjadi salah satu unggulan Indonesia.

Secara khusus, terkait ekspor yang sudah berjalan, Indonesia juga meminta fasilitasi ruang untuk berdiskusi terkait beberapa regulasi Pemerintah India terhadap ekspor pinang dan *refined palm oil* Indonesia yang berpotensi mempengaruhi kinerja peningkatan nilai perdagangan kedua negara. India menerapkan tarif bea masuk untuk pinang (*areca/betel nut*) Indonesia ke India mencapai 100% dalam lima tahun terakhir. India juga berencana akan mengurangi dan menghentikan impor *Refined Palm Oil* agar proses *refinery* dilakukan sepenuhnya di India guna menyediakan lapangan pekerjaan. Butir-butir kesepakatan pertemuan akan ditindaklanjuti di level teknis.



Pertemuan Menteri Pertanian RI dan Pejabat Eselon I Kementan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Y.M. Lyudmila Georgievna Vorobieva (21/5/21)

Indonesia - Rusia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama, Akses Pasar dan Investasi Bidang Pertanian

Kementerian Pertanian RI mendorong percepatan finalisasi *Memorandum of Understanding* bidang pertanian RI-Rusia sehingga dapat memperkuat kerja sama teknis, riset, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, promosi bersama untuk komoditas pertanian, serta peningkatan investasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo pada saat menerima Kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia, Y.M. Lyudmila Georgievna Vorobieva di Jakarta tanggal 21 Mei 2021.

Sejumlah hal penting dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya terkait rencana investasi salah satu perusahaan asal Rusia di Indonesia yaitu *Artis International Pte. Ltd* untuk pengembangan budidaya dan industri jagung, stevia dan gandum di Indonesia. Dalam hal ini, Mentan mengharapkan agar Pemerintah Rusia melalui Dubes Rusia untuk Indonesia dapat mendorong komitmen dan percepatan rencana investasi tersebut. Lokasi sementara yang ditawarkan untuk implementasi kerja sama adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berkaitan dengan perdagangan, Mentan mendorong peningkatan nilai perdagangan Indonesia - Rusia yang relatif masih kecil. Sebagai catatan, total nilai perdagangan sektor pertanian Indonesia - Rusia baru mencapai USD 677 juta pada tahun 2020.

Sebagai upaya menambah total nilai perdagangan komoditas pertanian kedua negara, pada kesempatan tersebut, Mentan menekankan kembali harapan agar Rusia dapat memberikan akses pasar bagi komoditas buah tropis Indonesia yaitu nanas dan pisang. Indonesia juga berharap agar Rusia dapat mempertimbangkan untuk menghapus sejumlah regulasi yang berpotensi menghambat perdagangan kedua negara, seperti peraturan Undang-Undang dan peraturan teknis tertentu.



NERACA PERDAGANGAN INDONESIA - RUSIA TAHUN 2020



INDONESIA
SURPLUS

624 Juta
USD

TOTAL NILAI
PERDAGANGAN

677 Juta
USD

Top 3 Komoditas Ekspor Indonesia



467 Juta
USD
Kelapa Sawit



40 Juta
USD
Kelapa



39 Juta
USD
Kakao

Top 3 Komoditas Ekspor Rusia



16 Juta
USD
Gandum



6 Juta
USD
Ketumbar



3 Juta
USD
Obat Hewan

Penandatanganan Letter of Intent

Pada kesempatan lain, Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Y.M. Lyudmila Georgievna Vorobieva, kembali bertemu untuk menandatangani *Letter of Intent* (LoI) pada tanggal 10 Juni 2021 di Jakarta. Penandatanganan *Letter of Intent* ini merupakan salah satu langkah kecil untuk mencapai tujuan-tujuan besar ke depan bagi kedua negara dalam rangka membangun komitmen untuk memperkuat hubungan kedua negara, khususnya di sektor pertanian. Komitmen ini diharapkan dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang.

Pada akhir pertemuan, Mentan memberikan souvenir dalam bentuk syal batik dan kopi Indonesia. Melalui souvenir tersebut, Mentan berharap Duta Besar Rusia dapat semakin mempromosikan kopi Indonesia di pasar Rusia mengingat adanya beberapa permintaan kopi asal Indonesia dari para pelaku usaha kopi di Rusia.



Penandatanganan Letter of Intent Mentan RI dan Dubes Rusia untuk Indonesia di Kedutaan Besar Rusia di Jakarta (10/6/21)



Pertemuan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dengan Delegasi Rumania (24/5/21)

Indonesia - Rumania Sepakat Inisiasi Kerja Sama Rekayasa Cuaca Sektor Pertanian

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo menyambut baik inisiasi kerja sama teknis dan investasi dengan Rumania, khususnya kerja sama rekayasa cuaca untuk sektor pertanian. Saat ini, perubahan cuaca semakin sulit untuk diprediksi dan cuaca merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan keberhasilan sektor pertanian. Banyak kegagalan panen pada komoditas pertanian disebabkan oleh adanya perubahan cuaca yang belum dapat diantisipasi sepenuhnya.

Hal tersebut disampaikan pada pertemuan antara Menteri Pertanian RI dengan Delegasi Pertahanan dan Prainvestasi Rumania pada 24 Mei 2021 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI Jakarta. Y.M. Mr. Neculai Tanase, bertindak selaku Ketua Delegasi Pertahanan dan Prainvestasi Rumania.

Teknologi modifikasi cuaca merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dari perubahan cuaca terhadap keberhasilan produksi pertanian. Pada kesempatan tersebut, Mentan menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang fokus membangun kawasan pangan terpadu (*cluster food estate*) di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan komoditas strategis Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian berpandangan bahwa teknologi modifikasi cuaca yang akan diperkenalkan oleh Rumania berpotensi untuk diaplikasikan pada proyek-proyek pengembangan *food estate* yang ada di Indonesia.

Merespon keinginan pihak Rumania untuk mendirikan perusahaan perwakilan di Indonesia dan melakukan *case studies* dan penelitian dibidang modifikasi cuaca, Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dapat menjadi *partner* strategis bagi pihak swasta Rumania untuk kolaborasi *case studies* dan penelitian modifikasi cuaca di Indonesia. Mentan mengusulkan agar kegiatan penelitian dan *case studies* tersebut dapat dilakukan di wilayah-wilayah pengembangan kawasan pangan terpadu (*food estate*).

Pada pertemuan tersebut juga dibahas beberapa peluang kerja sama sektor pertanian lainnya dengan Rumania diantaranya: Investasi pengembangan gandum dan peternakan sapi di Indonesia, pengembangan infrastruktur dan sistem pengelolaan air untuk pertanian, pengembangan perkebunan anggur di lahan pertanian bekerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk produksi *wine, juice*, dan produk-produk lain berbahan baku anggur, serta penanganan limbah pertanian.

TOP TRADE 2020 (USD)



828 juta
Karet

282 juta
Kakao

280 juta
Rempah



249 juta
Madu Alami

161 juta
Karet

73 juta
Tembakau



Pertemuan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dengan Dubes Uni Eropa di Indonesia, Y.M. Vincent Piket (21/5/21)

Indonesia Perkuat Kerja Sama Pertanian dengan Uni Eropa

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa di Jakarta, Y.M. Vincent Piket, pada 21 Mei 2021 di Kantor Kementerian Pertanian RI. Pada pertemuan tersebut, Mentan menekankan untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua negara melalui pelatihan kepada petugas *Central Competent Authority* (CCA) Indonesia untuk dapat dengan mudah mengoptimalkan pemanfaatan sistem *Trade Control and Expert System* (TRACES) untuk konfirmasi digital kelengkapan dokumen *Sanitary and Phytosanitary* produk hewan dan tumbuhan yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Indonesia berharap bahwa kemudahan dalam mengoperasikan sistem tersebut akan memperlancar proses akses pasar komoditas pertanian ke pasar Uni Eropa, serta meningkatkan nilai perdagangan komoditas pertanian kedua negara yang mencapai USD 2,7 milyar pada tahun 2020.

Uni Eropa telah mengeluarkan beberapa kebijakan dasar guna mendorong pertumbuhan ekonomi Eropa dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Mentan berpandangan bahwa kebijakan tersebut cukup baik bagi Uni Eropa dan dunia, namun akan berdampak bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dalam hal kesulitan untuk pemenuhan persyaratan keamanan pangan (*food safety*) komoditas pertanian yang akan masuk ke wilayah Uni Eropa.

Untuk itu, Mentan mengusulkan kerja sama teknis dan pendampingan dari Uni Eropa dalam hal peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai tambah komoditas pertanian Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga berharap Uni Eropa dapat meningkatkan nilai investasi pada sektor pertanian di Indonesia.

Merespon permintaan Indonesia, Duta Besar Vincent Piket berkomitmen untuk meningkatkan hubungan kerja sama Indonesia-Uni Eropa, khususnya pada sektor pertanian. Selanjutnya, Uni Eropa menawarkan beberapa program kerja sama, seperti penelitian dan pengembangan sektor pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan investasi.

Dalam hubungan perdagangan komoditas pertanian, Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan Uni Eropa yang mencapai USD 786,4 juta pada tahun 2020.



Courtesy call Mentan RI dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Y.M. Xiao Qian (10/5/2021)

Mentan Dorong Akses Pasar Komoditas Pertanian Indonesia ke Tiongkok serta Kerja Sama Pertanian melalui MoU

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo melakukan *Virtual Courtesy Call* dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Y.M. Xiao Qian, pada 10 Mei 2021 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Mentan didampingi oleh para Kepala Badan dan Direktur Jenderal, Staf Khusus, serta pejabat lainnya. Mentan dan Duta Besar Tiongkok saling menyampaikan apresiasi atas kerja sama di bidang pertanian antara kedua negara yang terjalin dengan baik hingga saat ini.

Hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di bidang pertanian dilakukan di bawah payung kerja sama *Memorandum of Understanding in Agriculture* yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI dan Menteri Pertanian dan Pedesaan Tiongkok pada tahun 2001. Mengingat MoU sudah cukup lama, kedua pihak saat ini sedang melakukan pembaharuan MoU untuk memperkuat komitmen kedua negara dalam mendukung pembangunan pertanian. Salah satu komitmen tersebut adalah menghidupkan kembali forum bilateral bidang pertanian Indonesia dan Tiongkok melalui *Joint Committee Meeting (JCM) on Agriculture*.

Forum *Joint Committee Meeting (JCM) on Agriculture* diharapkan dapat mendorong kerja sama pertanian, termasuk peningkatan kapasitas, perdagangan, dan investasi pertanian.

Dubes Tiongkok menyampaikan bahwa kerja sama Tiongkok dan Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat dan potensi yang cukup luas. Duta Besar Xiao Qian berharap dapat menjadi jembatan untuk kerja sama pertanian kedua negara. Dubes Tiongkok menyampaikan bahwa investasi pertanian juga merupakan komponen yang penting. Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 20 perusahaan Tiongkok yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektor-sektor minyak sawit, karet, dan peternakan unggas.

Selain itu, kerja sama antar perwakilan institusi pendidikan dan teknologi di kedua negara juga terjalin dengan baik. Tahun ini Tiongkok akan menyelenggarakan seminar ketahanan pangan bagi negara-negara berkembang dan diharapkan Indonesia dapat turut berpartisipasi.

Permintaan sarang burung walet, porang, dan buah-buahan tropis di Tiongkok besar. Menurut Mentan, dengan kerja sama yang harmonis, semua kebutuhan Tiongkok tersebut dapat dipenuhi Indonesia dengan mematuhi standar yang sudah ada. Hal ini merupakan peluang kerja sama, mulai dari investasi sampai dengan pemenuhan syarat perdagangan ke Tiongkok.

Di sisi lain, Dubes Tiongkok juga menyampaikan beberapa *concern* Tiongkok yang diharapkan dapat diberikan perhatian, yaitu pemeriksaan karantina serta kuota impor komoditas pertanian Tiongkok. *Concern* ini merupakan hal yang penting untuk dibahas dan diselesaikan bersama demi kepentingan dan hubungan kedua negara.

Mentan menutup pertemuan dengan harapan untuk berkunjung menemui Menteri Pertanian dan Pedesaan Tiongkok dan Menteri *General Administration of Customs of China* (GACC) untuk memperkuat kerja sama dan menyelesaikan isu-isu yang ada. Dubes Tiongkok menyambut baik rencana kunjungan Mentan ke Tiongkok.

Mentan memandang perdagangan komoditas pertanian Indonesia-Tiongkok sejauh ini sudah berjalan sangat baik dengan nilai yang cukup positif bagi kedua negara. Namun demikian, masih ada beberapa hambatan dalam perdagangan komoditas pertanian, diantaranya akses pasar sarang burung walet, porang (*konjac chips*), manggis, buah naga, salak, nanas, durian, dan mangga. Hambatan perdagangan tersebut pada umumnya terletak pada proses perizinan akses pasar dan registrasi di otoritas karantina Tiongkok (GACC).

Dubes Tiongkok menyampaikan bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar sarang burung walet dan Tiongkok merupakan konsumen sarang burung walet terbesar dan sangat menyambut buah-buahan tropis Indonesia yang aman dan berkualitas. Pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan yang baru bagi otoritas terkait di Tiongkok untuk memproses permohonan akses pasar ini. Namun demikian, Dubes Tiongkok berkomitmen akan aktif mendorong otoritas terkait di Tiongkok untuk memproses permohonan akses pasar dari Indonesia dengan baik.



NERACA PERDAGANGAN INDONESIA - TIONGGOK TAHUN 2020



**INDONESIA
SURPLUS
1,7 miliar
USD**

**TOTAL NILAI
PERDAGANGAN
4,9 miliar
USD**

Top 3 Komoditas Ekspor Indonesia


**2,9 miliar
USD**
Kelapa Sawit


**594 juta
USD**
Karet


**169 juta
USD**
Kelapa

Top 3 Komoditas Ekspor Tiongkok


**713 juta
USD**
Obat Hewan


**597 juta
USD**
Bawang Putih


**285 juta
USD**
Buah Pir

Interview Mentan RI dengan Gulf News

Kementerian Pertanian RI terus berupaya melakukan inovasi teknologi untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim global. Teknologi berperan penting sebagai salah satu kunci utama untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dalam sesi wawancara dengan Global FDI (*gulf news*) pada tanggal 29 Juni 2021 di Kantor Kementerian Pertanian RI. Tema wawancara terkait kerja sama bidang pertanian, investasi dan isu ketahanan pangan Indonesia-Uni Arab Emirat (UAE).

Indonesia memandang UAE sebagai salah satu negara yang berhasil mengembangkan komoditas pertanian melalui penerapan teknologi tinggi di tengah keterbatasan sumber daya alam dan iklim gurun. Untuk itu, Mentan sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan UAE, terlebih saat ini kedua negara telah memiliki MoU bidang pertanian yang ditandatangani pada Januari 2020.

Bagi Indonesia, harapan dari kerja sama kedua negara adalah terciptanya *transfer of technology* untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Peluang Indonesia bermitra dengan UEA dalam bidang pertanian tidak hanya sebatas *on farm* maupun *off farm* tetapi juga pada aspek pemasaran digital.

Mentan juga menyoroti pesatnya konsumsi pangan di kedua negara yang menjadikan ketahanan pangan sebagai isu utama yang menjadi prioritas bagi Indonesia dan UAE. Upaya peningkatan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui penguatan hubungan dagang. Hal tersebut didukung dengan akan diresmikannya kerja sama perdagangan bebas Indonesia - UAE *Comprehensive Partnership Agreement* (IUAE - CEPA), sehingga diharapkan ke depan akan semakin mempermudah aliran barang khususnya komoditas pangan diantara kedua negara.

Courtesy Meeting Mentan RI dengan Dubes RI di Qatar

Indonesia menyambut baik tawaran investasi dari salah satu perusahaan pengolahan susu Qatar yaitu Baladna Co. Q.P.S.C untuk membangun industri pengolahan susu di Indonesia. Tawaran investasi tersebut merupakan kesempatan bagi peningkatan nilai investasi di dalam negeri sekaligus memberikan peluang bagi pengembangan industri susu nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dalam pertemuannya dengan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan pada tanggal 2 Juni 2021 di Kantor Kementerian Pertanian RI.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian mengakui bahwa selama ini kebutuhan susu dalam negeri sebagian besar masih dipenuhi dari impor. Susu yang diproduksi di dalam negeri saat ini hanya mampu berkontribusi sekitar 20% dari total kebutuhan susu nasional. Namun demikian, upaya meningkatkan produksi susu guna mengurangi kebutuhan impor tetap dilakukan melalui berbagai program, termasuk membuka peluang investasi dari negara mitra.

Mentan berpandangan bahwa investasi Baladna dapat disinergikan dengan program dan kebijakan di Kementan dalam hal penyediaan sapi perah melalui mekanisme pemasukan dari negara lain yang telah memenuhi standar kualitas genetik dan aspek kesehatan hewan di Indonesia. Indonesia banyak mendatangkan jenis sapi *friesian holstein* (FH) dan tengah diupayakan juga mendatangkan jenis sapi *jersey* dari Australia dan USA.

Dari aspek produktivitas, Kementan telah melakukan upaya peningkatan dengan perbaikan genetik melalui pemanfaatan pejantan unggul sapi perah Indonesia hasil *Uji Zuriat/Progeny Test*; penerapan *Good Farming Practices*; dan pengembangan jenis sapi baru. Hal tersebut dapat dikombinasikan dengan teknologi yang dimiliki oleh Baladna sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas susu sapi secara signifikan dari 10 liter/hari menjadi 40 liter/hari di seluruh sentra produksi susu di Indonesia.



Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan komitmen transformasi sistem pangan sebagai prioritas Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 (27/7/2021) ©FAO

Mentan RI Prioritaskan Sistem Pangan Berkelanjutan Pada Presidensi G20 Indonesia



Pre Summit UN Food Systems (UNFSS) telah diselenggarakan pada 26-28 Juli 2021 secara *hybrid*. *Pre-Summit* merupakan kegiatan konsolidasi sebelum konferensi UNFSS pada 23 September mendatang.

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo pada sesi *"From the G20 Matera Declaration to the Food Systems Summit: A Framework for Emerging Coalitions of Action"*; difokuskan pada tindak lanjut Deklarasi Matera yang baru saja diadopsi oleh negara-negara G20 pada akhir Juni 2021. Deklarasi bertujuan untuk memperkuat koalisi dalam membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan inklusif, sejalan dengan target pencapaian SDG 2 *"Zero Hunger"*. Dalam sesi ini, para kepala negara menggarisbawahi pentingnya deklarasi ini sebagai call of action untuk mewujudkan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan, meningkatkan *social safety nets* dan *adaptable* terhadap perubahan iklim.

Mentan dalam intervensinya menyampaikan poin-poin pokok sebagai berikut: a) Komitmen untuk memprioritaskan sistem pangan berkelanjutan pada presidensi G20 mendatang; b) Komitmen untuk pencapaian SDG 2; c) Komitmen untuk melakukan transformasi sistem pertanian Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip berorientasi lokal, kolaborasi, transformatif, tangguh dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan, Indonesia juga terlibat aktif sebagai speaker pada sesi *"Mobilizing to Create 100% Living Income and Wages in Food Systems"* diwakili oleh: Deputi KSDA Bappenas; serta Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas selaku *National Convener* UNFSS Indonesia turut menyampaikan *national statement* pada sesi *Ministerial Statement Session*.

“As we look forward to the UN Food Systems Summit in New York and beyond, we need to keep the momentum going and translate this commitment to transforming our food systems at the country level. This requires new ways of working - building on multisectoral dialogue and collaboration with all stakeholders, including smallholders farmers, indigenous people, youth, the private sector and women.”



Amina J. Mohammed
UN Deputy Director-General

FAO Conference



Dirjen FAO QU Dongyu; Presiden Italia Sergio Mattarella; H.E. Monseigneur Fernando Chica Arellano Permanent Observer of the Holy See to FAO; Khalid Mehboob, Independent Chairperson of the Council (14/6/2021) ©FAO

Pertemuan FAO Konferensi Sesi ke-42 telah dilaksanakan secara virtual pada tanggal 14-18 Juni 2021. Pertemuan dihadiri oleh lebih dari 1,300 delegasi, termasuk 119 Menteri dan Wakil Menteri Pertanian. Sidang dibagi dalam tiga sesi yaitu *Plenary*, Komisi I dan Komisi II yang dilaksanakan secara paralel.

Pada sesi *Plenary*, 91 Menteri Pertanian dan Wamentan telah menyampaikan intervensi terkait situasi ketahanan pangan dan pertanian global dan perkembangan di negara masing-masing sesuai dengan tema *State of Food and Agriculture (SOFA)* tahun 2021 yaitu *"Agriculture Food Systems Transformation: From Strategy to Action"*. Pada sesi ini, Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan komitmen untuk mendukung transformasi sistem pangan dan pertanian melalui kebijakan Lima Cara Bertindak (*Five Ways of Action*) yang sejalan dengan *Five Action Tracks of UN Food Systems Summit (UNFSS)*, capaian sektor pertanian di masa pandemi, serta mendorong penguatan kerja sama dengan FAO melalui KSST dan digitalisasi sektor pertanian.



Mentan juga menyampaikan *progress* UNFSS di Indonesia melalui serangkaian *national dialogues* bersama berbagai pihak yang dikoordinasikan oleh Bappenas selaku *National Convenor* UNFSS.

Peran Aktif Indonesia di Forum FAO: Indonesia Terpilih Kembali Sebagai Dewan FAO Periode 2021 - 2024

Salah satu capaian penting Sidang *Conference* ke-42 adalah terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota *Council* mewakili kelompok regional Asia bersama Bangladesh, RRT, Jepang, Filipina dan Korea Selatan, untuk periode Juni 2021 hingga 30 Juni 2024. Terpilihnya Indonesia menunjukkan merepresentasikan kepentingan Asia, yang telah dibuktikan melalui partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai forum FAO untuk mempromosikan upaya serius dan keberhasilan penanganan dampak Serius COVID-19 terhadap ketahanan pangan termasuk melalui percepatan digitalisasi sektor pertanian.

Konferensi juga berhasil menetapkan *Independent Chairperson of the Council* untuk periode 2021-2023, Mr Hans Hoozeveld dari Belanda yang terpilih dengan perolehan suara dua putaran (Dominican 62, Belanda 104, total 169 votes, abstain 3). Pertemuan Konferensi FAO Sesi ke-43 akan diselenggarakan pada tanggal 1-7 Juli 2023.

FAO Sampaikan Komitmen Konkret Mendukung Presidensi G20 Indonesia



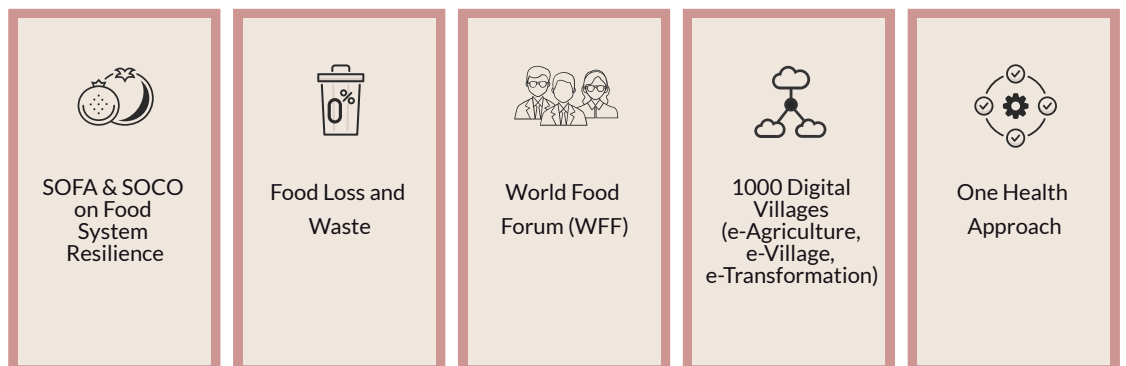
Chief Economist FAO, Maximo Torero bersama Tim Substansi G20 Kementan (10/8/2021)

Pada tanggal 10 Agustus 2021 telah dilakukan pertemuan virtual tim Kementerian Pertanian dengan *Chief Economist* FAO, Mr Maximo Torero Cullen yang bertujuan untuk menjajaki area kerja sama Pemri-FAO dalam keketuaan Indonesia di G20 tahun 2022.

FAO menyampaikan siap mendukung Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 khususnya di Kelompok Kerja Sektor Pertanian. FAO menyampaikan beberapa potensi topik yang perlu ditindaklanjuti setelah presidensi Italia: *Koalisi Pangan; One Health Approach; Digital Agriculture; Joint meetings*.

FAO juga menyampaikan masukan mengenai *priority issues* AWG G20 Indonesia diantaranya: digitalisasi merupakan topik kunci yang konsisten dibahas di forum G20 dan berfokus pada: (1) *data accessibility, privacy use of data*, (2) *bridging the digital divide*, (3) *ethical use of AI*, (4) *cyber security*. FAO juga telah bekerja sama dengan Italia untuk melakukan *survey* resiliensi, sehingga diharapkan ada kontinuitas pada Presidensi Indonesia. Terkait *International food and trade* dapat dielaborasi lebih lanjut, karena kurang menjadi perhatian pada Presidensi Italia. Selain itu, teknologi *remote sensing, geospatial platform* dapat menjadi obyek *showcasing digital agriculture*. Sebagai tindak lanjut, Tim FAO akan mengirimkan jurnal mengenai topik-topik yang relevan (e.g. *food loss and waste, resilience indicators*) serta kedua pihak baik FAO dan Kementan dapat menetapkan *focal point team* untuk masing-masing *priority issues*.

Program FAO yang sejalan dengan prioritas Presidensi G20 Indonesia





Courtesy Call Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi dan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Chile, Y.M. Rodrigo Yanes, (7/6/2021)

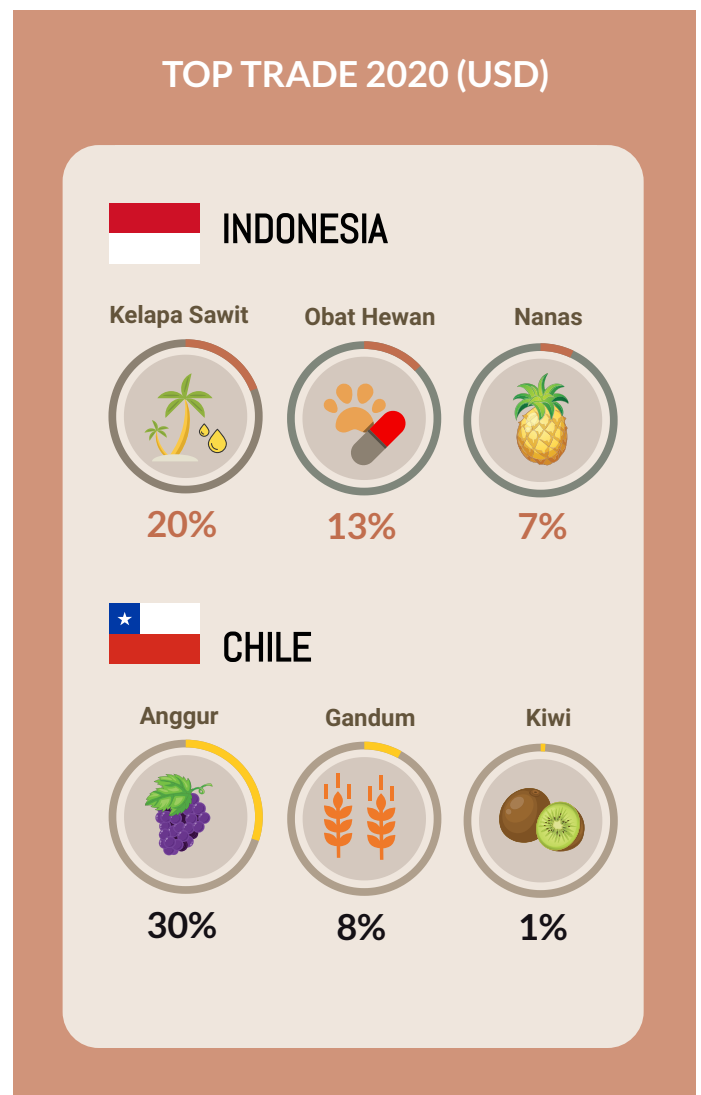
Pertemuan Wakil Menteri Pertanian RI dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Chile

Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Chile Y.M. Rodrigo Yanes telah mengunjungi Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi pada tanggal 7 Juni 2021. Kunjungan Wamenludag Chile ke Indonesia dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan Chile.

Kementerian Pertanian RI telah menginisiasi pembentukan *Memorandum of Understanding* (MoU) bidang pertanian dengan pihak Chile melalui Kedutaan Besar Chile di Jakarta pada Juni 2020. MoU ini sangat penting bagi kedua negara sebagai payung hukum untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan kerja sama sektor pertanian, yang meliputi kerja sama teknis, riset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, promosi bersama untuk komoditas pertanian, serta peningkatan investasi. Kedua pihak telah melakukan komunikasi yang sangat intensif untuk menyelesaikan pembentukan MoU dimaksud.

Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama akses pasar. Chile sangat berkepentingan untuk menjaga pasar ekspor buah-buahnya ke Indonesia seperti anggur, ceri, dan kiwi, sementara Indonesia berkepentingan untuk memasarkan buah-buahan tropis, seperti nanas, mangga, pisang, manggis, dan salak. Chile juga telah menyampaikan minatnya untuk dapat memasok daging dan binatang hidup ke Indonesia.

Kerja sama yang makin erat dengan Chile diharapkan membawa dampak positif bagi perdagangan komoditas pertanian Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin, mengingat posisi Chile secara geografis yang sangat menguntungkan, dengan garis pantainya yang memanjang di bagian selatan benua Amerika, untuk dapat menjadi hub perdagangan di kawasan Amerika Latin.



Interview Asia Palm Oil Magazine dengan Sekjen Kementan RI

Asia Palm Oil Magazine telah mengadakan *live interview session* bersama dua narasumber, yakni Sekjen Kementerian Pertanian, Dr Kasdi Subagyono selaku wakil dari *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan *Chief Executive Officer* (CEO) - *Malaysian Palm Oil Certification Council* (MPOCC) melalui *Zoom platform* pada hari Kamis, 15 Juli 2021, pukul 14.00 WIB.

Dalam wawancara tersebut, terdapat beberapa hal yang dikemukakan Sekjen:

01 Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyikapi pentingnya keberlanjutan bagi masyarakat

02 Tantangan lain yang dihadapi ISPO dalam memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia

03 Peran RSPO untuk Indonesia yang sudah memiliki ISPO yang sesuai dengan peraturan lokal

04 Cara membedakan ISPO dari RSPO

05 Dampak penolakan Eropa terhadap impor minyak sawit

06 Perbandingan program keberlanjutan dalam minyak sawit dan minyak nabati lainnya

Dari segala tantangan yang teridentifikasi dan kebijakan yang telah dibuat, seperti peta jalan (*roadmap*) yang menjadi panduan pengelolaan kelapa sawit dari hulu sampai hilir, Indonesia perlu memastikan rangkaian kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.



Terkait sertifikasi kelapa sawit, Pemerintah Indonesia terbuka, termasuk terhadap *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), sepanjang sejalan dengan kebijakan pemerintah atau berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mendorong terwujudnya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

ISPO dan RSPO memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menekan berkurangnya tutupan hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca dari perubahan fungsi lahan, serta kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Namun, terdapat perbedaan dari unsur yang terkandung dalam persyaratan kedua standar tersebut. Perbedaan yang mendasar dari kedua unsur tersebut menyangkut kawasan lindung dan konsep Nilai Konservasi Tinggi, prosedur pemindahan hak lahan perkebunan sawit berdasarkan ketentuan perundangan di Indonesia, pelaksanaan *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam RSPO, serta prosedur untuk penanaman baru.

Keputusan parlemen Uni Eropa tentang penghentian impor kelapa sawit dapat membuat citra industri hilir kelapa sawit menjadi semakin buruk di mata internasional. Pasar merespon kebijakan parlemen Uni Eropa tersebut dengan melakukan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. Turunnya harga minyak kelapa sawit secara signifikan serta menurunnya nilai ekspor kelapa sawit Indonesia dapat berakibat pada terhentinya industri sawit dalam negeri. Kondisi itu dapat menutup mata pencaharian 5,3 juta kepala keluarga petani kelapa sawit serta menurunnya kesejahteraan petani.

Dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya, minyak sawit memiliki kelebihan, seperti harga yang jauh lebih murah karena efisiensi lahan, kandungan gizi yang lebih baik dari komoditas minyak nabati utama lainnya, serta merupakan penyumbang kerusakan lingkungan yang paling kecil di antara komoditas minyak nabati yang ada.

RANGKAIAN PERTEMUAN APEC MEI - AGUSTUS 2021

The 6th Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Ministerial Meeting on Food Security

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Dr Ade Candradijaya, memimpin delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) APEC Bidang Ketahanan Pangan ke-6 dibawah kepemimpinan Selandia Baru pada tanggal 19 Agustus 2021.

Pertemuan ini merupakan puncak dari rangkaian pertemuan APEC bidang ketahanan pangan. Pada pertemuan *Policy Partnership on Food Security (PPFS) 2* yang diselenggarakan tanggal 10-11 Agustus 2021 mengesahkan dokumen *Food Security Roadmaps towards 2030* dan konsep *Joint Ministerial Statement on Food Security*.

Dalam PTM APEC Bidang Ketahanan Pangan ke-6 dibahas pemanfaatan inovasi dan digitalisasi oleh kawasan APEC untuk memastikan pemulihan ketahanan pangan pasca COVID-19.

Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang bersifat adaptif dan mudah diakses berperan penting untuk mencapai ketahanan pangan, terlebih jika dapat memenuhi kebutuhan spesifik petani dan nelayan kecil, serta UMKM. Indonesia juga menyinggung pentingnya penyuluh pertanian dan perikanan sebagai jembatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di tingkat dasar.

Indonesia juga mengapresiasi dokumen *Roadmap Ketahanan Pangan 2030* yang disepakati di PTM ini sebagai acuan dalam mencapai ketahanan pangan di kawasan

APEC. Hal yang menjadi catatan penting adalah langkah tindak lanjut Indonesia terhadap implementasi dari *Roadmap* tersebut. Dalam hal ini, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Litbang Pertanian selaku *focal point* ketahanan pangan di APEC dapat berpartisipasi aktif sekaligus mengawal agenda kepentingan nasional dalam agenda-agenda pembahasan implementasi *Roadmap 2030* tersebut.

Pertemuan juga menyepakati Pernyataan Bersama Menteri APEC Bidang Ketahanan Pangan, yang menegaskan pentingnya adaptasi ekonomi anggota APEC dalam menghadapi perubahan akibat dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19 melalui penguatan sektor UMKM, seperti produsen skala kecil di sektor pangan, pertanian dan perikanan dengan tekad tidak meninggalkan siapapun.



Workshop on Reducing FLW along the Food Value Chain in APEC During and Post COVID-19 Pandemic

Sebagai perwujudan terhadap kesepakatan Roadmap Ketahanan Pangan APEC 2020 untuk pengurangan kehilangan dan limbah pangan (*Food Loss and Waste/FLW*) dan juga adanya dampak pandemi COVID-19 pada sistem pertanian dan pangan, maka *APEC Chinese Taipei menyelenggarakan workshop* pada 30 Juni-2 Juli 2021 secara daring.

Berdasarkan dokumen Roadmap Ketahanan Pangan APEC 2030 bahwa ekonomi anggota APEC akan berusaha untuk mengurangi kehilangan dan limbah pangan (FLW) sebesar 10% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tingkat 2011-2012. Tujuan pengurangan 10% adalah tingkat rata-rata untuk semua ekonomi anggota APEC, dengan indikator spesifik yang dikembangkan berdasarkan situasi masing-masing ekonomi anggota APEC.

Selain itu, munculnya kekhawatiran yang meluas tentang dampak pandemi COVID-19 pada sistem pertanian dan pangan dikarenakan adanya pembatasan aktivitas dan tindakan karantina telah mengakibatkan peningkatan FLW yang signifikan di banyak negara.



Food Security

19th August 2021

The 2nd Committee on Trade and Investment (CTI2)

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 di kawasan Asia-Pasifik dengan tetap menghormati perbedaan kebijakan domestik masing-masing ekonomi anggota APEC. Komitmen tersebut ditunjukkan pada pertemuan daring kedua *The Committee on Trade and Investment/ CTI2* pada 25-27 Mei 2021.

Pertemuan membahas mengenai upaya penguatan rantai pasok, distribusi vaksin, fasilitasi pergerakan lintas batas untuk para pelaku bisnis serta pemanfaatan teknologi digital dalam fasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.

Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kemendag selaku Ketua Delegasi RI untuk forum CTI menyampaikan Indonesia mendukung tiga prioritas keketuaan Selandia Baru pada APEC 2021. Sebagai forum ekonomi regional, APEC perlu melakukan tindakan bersama dalam percepatan pemulihan ekonomi yang terarah, inklusif, berkelanjutan, serta berbasis inovasi dan digitalisasi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan juga telah menetapkan kebijakan perdagangan darurat untuk kemudahan fasilitasi beberapa barang esensial yang mendukung percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19. Pelaksanaan kebijakan perdagangan tersebut tetap memprioritaskan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia menekankan dalam upaya kolektif percepatan pemulihan ekonomi di Asia-Pasifik, diperlukan kerja sama dan fleksibilitas antar ekonomi serta sikap saling menghargai perbedaan kebijakan masing-masing ekonomi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ekonomi anggota APEC memerlukan upaya kolaborasi strategis di seluruh rantai pasokan, pergerakan lintas batas untuk layanan darurat dan arus kargo, dan adopsi teknologi digital seperti perangkat internet, kecerdasan buatan, *big data*, dan rantai blok melalui kemitraan publik-swasta.

Selain itu, dibahas juga mengenai isu investasi dan kebijakan publik untuk menciptakan insentif guna mendukung upaya pengurangan FLW dan memperkuat koordinasi kebijakan antar ekonomi anggota APEC pasca pandemi COVID-19.

Adapun hasil dari Workshop ini berupa rekomendasi yang akan menjadi referensi bagi ekonomi anggota APEC untuk mengidentifikasi tindakan spesifik mengatasi FLW selama dan pasca pandemi COVID-19 sesuai dengan kepentingan domestik masing-masing ekonomi anggota APEC.





Sekretaris Ditjen. Perkebunan, Dr Antarjo Dikin pada pertemuan JCM ASEAN ke-28 (15/7/21)

Peningkatan Daya Saing Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan Kawasan melalui JCM ASEAN

Dalam rangka mendukung visi ASEAN dalam peningkatan ketahanan pangan dan daya saing di tingkat internasional untuk produk-produk pangan, pertanian dan kehutanan, ASEAN melalui forum ASEAN Cooperation on Agriculture and Forest Product Promotion Scheme (JCM) menggelar pertemuan yang ke-28 secara virtual pada tanggal 15 Juli 2021. Dihadiri oleh perwakilan Negara Anggota ASEAN kecuali Brunei Darussalam dan Singapura, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr Antarjo Dikin, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Dr. Ye Tint Tun, Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Irigasi, Myanmar, selaku Ketua pertemuan dalam pembukaannya menyampaikan bahwa forum akan membahas isu dan tantangan yang ada di masing-masing industri di sektor pertanian dan kehutanan, serta untuk memperkuat posisi bersama perdagangan ASEAN di pasar internasional khususnya di masa pandemi saat ini. Forum JCM terdiri dari 12 (dua belas) *National Focal Point of Working Group (NFPWG)* yang meliputi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Indonesia merupakan *lead country* untuk komoditas teh, lada dan tuna, serta berpartisipasi aktif pada kelompok komoditas kelapa sawit, kakao, kopi dan kelapa.

Pada kesempatan ini, Indonesia melaporkan produksi, ekspor dan impor lada dan teh di Indonesia. Kebijakan lada dan teh di Indonesia juga turut dibahas khususnya terkait pengembangan logistik benih dan sumber daya, modernisasi pertanian, pembiayaan komoditas, peningkatan produksi dan produktivitas, diversifikasi produk, dan kegiatan promosi serta peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor.

Melalui forum penting ini, Indonesia mengajak Negara Anggota ASEAN, untuk bersama-sama melawan diskriminasi dan politisasi terhadap *vegetables oil*, khususnya *palm oil*. Selain itu, Indonesia juga mendorong AMS untuk lebih produktif membahas pembentukan ASEAN *Rubber Council (ARCo)* untuk kepentingan pengembangan Natural Rubber di kawasan ASEAN melalui strategi-strategi yang lebih operasional.



Kebijakan Komoditas Teh di Indonesia

Pengembangan Logistik Benih   Meningkatkan produktivitas	Pengembangan SDM Kelompok Tani   Diversifikasi produk	Modernisasi / Mekanisasi   Promosi dan advokasi	Pemodalan melalui KUR   Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor
---	--	--	--



G20 Agriculture Deputies Meeting ke-2 Presidensi Italia Tahun 2021

Pertemuan Agriculture Deputies Meeting ke-2 G20 PRESIDENSI ITALIA (13-14/7/21)

Sidang *Agriculture Deputies Meeting* (ADM) ke-2 G20 PRESIDENSI ITALIA tahun 2021 telah diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juli 2021 secara virtual. Pertemuan ADM ke-2 ini telah berhasil memfinalkan *draft communique* sebagai kesepakatan/*consensus* bersama diantara negara-negara anggota G20. *Draft communique* ini nantinya diharapkan akan menjadi keluaran Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian (*Agriculture Ministers Meeting/AMM*) yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 September 2021 di Florence, Italia.

Selain membahas *draft communique*, pertemuan ADM ke-2 juga membahas hasil laporan dan evaluasi *Meeting of Agriculture Chief Scientists* (MACS) 2021. Pertemuan MACS telah dilaksanakan pada tanggal 15-16 Juni 2021 secara virtual dengan tema *The Role of Science, Technology and Innovation in Sustainable Food System to Improve Food Security and Safety*.

Pada sesi penutupan, Indonesia sebagai negara Troika G20 PRESIDENSI ITALIA berkesempatan menyampaikan *statement* singkat berupa *overview issue notes* keketuaan Indonesia pada *Agriculture Working Group* dan mengundang semua anggota G20 untuk hadir pada rangkaian pertemuan G20 PRESIDENSI INDONESIA tahun 2022 yang diharapkan sudah dapat diselenggarakan secara tatap muka.

MACS COMMUNIQUE



- 1 Komitmen untuk memobilisasi science networks G20 untuk berhubungan dengan Scientific Group UNFSS.

Mengundang investasi untuk penelitian dan pengembangan teknologi digital yang inovatif.

2



- 3 Mendorong kerja sama penelitian untuk meningkatkan penggunaan dan aplikasi teknologi digital traceability

Mendorong pertukaran internasional terkait pengetahuan genome editing dan aplikasinya di bidang pertanian

4



- 5 Mengajak investasi yang lebih besar dan efektif untuk penelitian dan pengembangan terkait iklim

Mendukung PRESIDENSI ITALIA untuk mengadakan: *workshop the interlinkages between sustainable agriculture and climate change, dan experts' meeting*

6



Rencana Percepatan On-going Project PHLN di Era Pandemi COVID-19

Belum meredanya COVID-19 sampai dengan 2021 masih memberikan dampak terhadap implementasi proyek Pinjaman Hibah Luar Negeri lingkup Kementerian Pertanian. Sebanyak enam proyek Pinjaman Luar Negeri masih mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga mempengaruhi capaian realisasi.

Hingga dengan triwulan II TA 2021, tiga proyek diantaranya masih berada pada posisi *atrisk*. Melihat rendahnya realisasi kegiatan maupun anggaran, maka masing-masing proyek telah melakukan berbagai pembahasan untuk menyusun langkah-langkah strategi percepatan kegiatan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pandemi COVID-19.

Biro KLN Kementan juga telah melakukan pendekatan dengan mengundang pihak *lender* IFAD dalam rangka upaya percepatan realisasi yang diadakan pada tanggal 29 Juli 2021 secara virtual, dihadiri oleh pelaksana kegiatan PHLN dari BPPSDMP. Terdapat empat PHLN di Kementerian Pertanian yang dibiayai oleh IFAD.

Kondisi proyek IPDMIP yang masih tersisa dua tahun (2022-2023) memiliki sisa anggaran 84,90%, (hingga triwulan II 2021). Sehingga perlu dilakukan terobosan khusus, diantaranya: realokasi untuk infrastruktur fisik dukungan sumber daya manusia, penyesuaian alokasi rencana anggaran pertahun dengan memperhitungkan nilai total komitmen dan rencana usulan perpanjangan perpanjangan proyek.

Sementara itu, Proyek YESS dan UPLANDs yang masih terbilang baru dapat memperhitungkan usulan rencana penarikan dengan melihat kondisi nilai total komitmen yang berbanding dengan nilai realisasi, sehingga alokasi rencana penarikan pertahun dapat lebih efektif agar status penyerapan dapat sesuai dengan periode proyek.

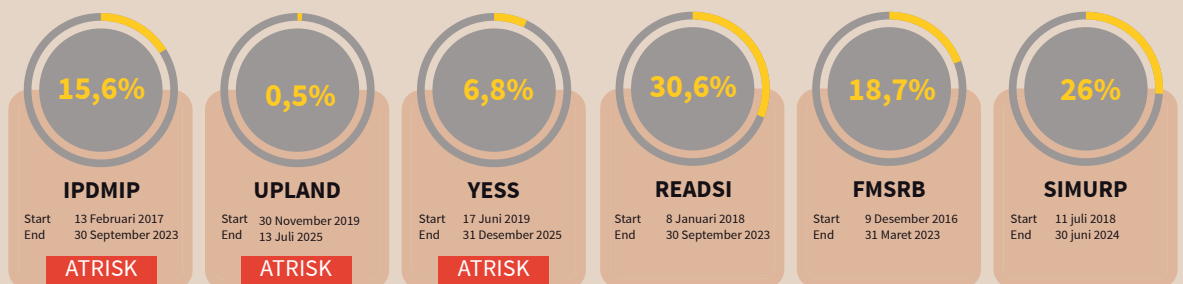
Biro KLN juga meminta kepada pihak *lender* untuk memberikan kemudahan dalam melakukan revisi kegiatan bagi kedua proyek ini, mengingat situasi pandemik di Indonesia belum berakhir yang menyebabkan sebagian besar komponen kegiatan yang bersifat *offline* tertunda/gagal kegiatan.

Perwakilan dari *Lender* IFAD sangat mengapresiasi pertemuan dalam rangka mencari solusi atas isu-isu keterlambatan realisasi yang terjadi pada pengelolaan PHLN di Kementan. Perwakilan IFAD menegaskan bahwa IFAD mendukung dengan baik rencana percepatan yang digagas oleh pihak Kementan.

Dari hasil pertemuan tersebut, Sekjen Kementan menyampaikan bahwa percepatan yang akan dilakukan tidak lepas dari program nasional Kementan, dan PHLN merupakan salah satu komponen pendukung dari capaian program kerja kementerian. Selanjutnya Sekjen juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pelaksana proyek untuk memformulasikan secara rinci kebutuhan dalam target percepatan realisasi PHLN Kementerian Pertanian.

Profil Realisasi

Proyek Pinjaman Luar Negeri



JICA akan Dukung Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian di Jabar

Melalui surat undangan yang disampaikan dari pihak *Japan International Cooperation Agency* (JICA) kepada Sekretaris Ditjen Hortikultura dan Biro KLN Kementan, JICA berencana membantu upaya peningkatan rantai nilai pangan utama termasuk hortikultura di Indonesia. Dalam hal ini, perwakilan JICA telah melakukan serangkaian diskusi dengan tim JICA Pusat terkait proyek kerja sama antara Pemerintah dengan sektor swasta untuk peningkatan pemasaran hasil pertanian dan sistem distribusi, tahap 2 (IJHOP4-2), serta mengidentifikasi kelompok tani potensial yang berlokasi di Jawa Barat.

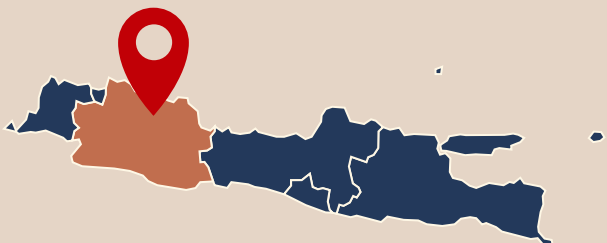
Pemberian bantuan didasarkan pada pedagang/pegepul mengalami kesulitan dalam mengunjungi petani dikarenakan pembatasan mobilitas di pasar modern. Di saat penerapan aturan pembatasan mobilitas, banyak bisnis e-commerce yang memulai penjualannya melalui kanal daring, sehingga kompetisi semakin sulit.

Dengan situasi tersebut, kelompok tani perlu meningkatkan hasil produksi hortikulturanya. Selain itu, kelompok tani juga diharapkan untuk memiliki kanal penjualan baru dengan menggunakan teknologi digital, dimana mereka dapat memiliki keragaman dalam target penjualannya yang tidak hanya ditargetkan untuk konsumen biasanya, tetapi juga konsumen besar seperti supermarket.

Terkait inisiasi kerja sama ini, Sesditjen Hortikultura menyambut baik rencana kerja sama hibah JICA, dengan tetap memperhatikan khususnya hal-hal terkait pemberian hibah langsung kepada kelompok tani, diantaranya kepastian distribusi bantuan yang tepat guna agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan dapat digunakan oleh kelompok tani penerima manfaat. Sebagai tindak lanjut pertemuan, JICA akan menyampaikan dokumen proyek untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kementan.

Proyek Kemitraan Publik-Swasta untuk Perbaikan Sistem Pemasaran dan Distribusi Produk Pertanian

Hibah Japan International Cooperation Agency (JICA)



Kelompok Tani Mujagi
Kelompok Tani Sinar Mukti



Kab. Bandung
Kab. Cianjur



6 Bulan



Melatih kelompok tani dalam penggunaan platform e-commerce, memberikan bantuan peralatan IT, *cold storage*, mesin pembersih/cuci, dan mesin pengepakan



Brief Update Penguatan Akses Pasar dengan Negara Mitra

Kementerian Pertanian c.q. Biro Kerja Sama Luar Negeri terus berupaya memfasilitasi penguatan akses pasar komoditas pertanian Indonesia di negara-negara mitra, melalui partisipasi dalam forum bilateral bidang pertanian, forum perundingan perdagangan bilateral, serta koordinasi melalui pertemuan virtual dengan pihak terkait di negara mitra yang terangkum sebagai berikut:

Indonesia terus mengusahakan akses pasar produk pertanian Indonesia ke Tiongkok. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan persyaratan teknis serta penyelesaian isu yang dapat menjadi hambatan. Kementerian Pertanian telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan isu akses pasar produk pertanian ke Tiongkok, seperti melakukan diskusi dengan pihak Tiongkok yang telah dilakukan melalui pertemuan antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan *Minister Counsellor* Kedutaan Besar Tiongkok, serta *virtual courtesy call* antara Menteri Pertanian RI dengan Duta Besar Tiongkok. Beberapa komoditas yang diusahakan untuk dapat tiingkatkan ekspornya ke Tiongkok, di antaranya sarang burung walet, porang, dan buah-buahan tropis, seperti buah naga, manggis, salak, nanas, dan durian.

TIONGKOK

MAURITIUS

Indonesia berpeluang mendapatkan penurunan tarif dan pembukaan akses pasar beberapa produk pertanian yang masih dikenakan tarif bea masuk yang tinggi di Mauritius melalui kerangka perundingan *Indonesia - Mauritius Preferential Trade Agreement*. Perundingan *Indonesia - Mauritius Preferential Trade Agreement* telah dilaksanakan sebanyak dua putaran. Perundingan putaran satu telah dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan perundingan kedua telah dilaksanakan pada Agustus 2021. Beberapa produk Indonesia yang memiliki potensi untuk mendapatkan penurunan tarif diantaranya teh, lada, vanilla, kayu manis, pala, cengkeh, dan jahe

Dalam rangka meningkatkan akses pasar, Indonesia dan UAE sepakat membentuk Indonesia - UAE CEPA. Sejauh ini, IUAE - CEPA telah melakukan *Pre Negotiating Consultation Meeting* dan pada awal September 2021 akan dilakukan *Launching Ceremony IUAE CEPA* dan persiapan teknis pertemuan *1st Round Negotiation IUAE - CEPA* di Indonesia. Beberapa produk yang di-*request* oleh Indonesia untuk mendapatkan penurunan tarif dan pembukaan akses pasarnya dalam skema IUAE - CEPA diantaranya adalah produk daging, susu, tanaman hidup/hias, buah dan sayuran, komoditi perkebunan (kelapa, pinang, kopra, kakao, tembakau, karet, *palm oil*) dan produk olahan olahan unggas.

UNI ARAB EMIRAT

Indonesia dan UK telah menandatangani MoU pembentukan *Joint Economic and Trade Committee* (JETCO). Penandatanganan MoU dilakukan oleh Mendag RI dan *Secretary of State of International Trade UK*. Pembentukan JETCO bertujuan untuk fasilitasi akses pasar produk kedua negara dan pertukaran regulasi produk makanan dan minuman. Pasar UK juga memiliki peluang bagi komoditi Manioc Indonesia dimana Inggris memberlakukan *Tarif Rate Quota* (TRQ) yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendapatkan penurunan tarif atas produk manioc sebesar 660,000 ton. Saat ini Ekspor manioc dari Indonesia ke Inggris yang terealisasi hingga 2020 juga sangat kecil nilainya (USD 147K/83 ton) pada tahun 2020 dengan *market share* hanya 2%. Sementara itu impor manioc Inggris nilainya mencapai USD 4,9 juta. Hal ini menunjukkan Inggris memiliki potensi pasar yang bagus untuk produk manioc Indonesia.

INGGRIS

UNI EROPA

Indonesia dan Uni Eropa (UE) saat ini sedang melakukan perundingan perjanjian perdagangan bilateral, yaitu *Indonesia - European Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA). Perundingan telah dilakukan sebanyak 10 Putaran. Salah satu kepentingan Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA adalah untuk memfasilitasi perdagangan dengan meminimalisir dampak negatif *non-tariff measures* (NTMs) dan mempermudah masuknya produk Indonesia ke UE.

UE selama ini dikenal sebagai salah satu negara mitra tujuan ekspor terbesar Indonesia, termasuk untuk produk perikanan dan pertanian. UE merupakan mitra potensial dengan jumlah populasi lebih dari 440 juta dan pendapatan per kapita sebesar US\$ 47,827. Meskipun berpotensi besar, namun masih terdapat hambatan di pasar UE, baik tarif yang masih tinggi maupun penerapan NTMs. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan teknis yang mengusung tema Penanganan Hambatan Non-Tarif ke Uni Eropa untuk Produk Perikanan dan Pertanian dalam Kerangka Indonesia - EU CEPA.

Melalui Pertemuan Bilateral antara Badan antara badan Karantina Pertanian dengan USDA, Indonesia berupaya untuk mengeksport komoditas nanas segar ke Amerika Serikat dimana permohonan fasilitasi akses pasar nanas segar asal Indonesia yang telah disampaikan sejak 2017.

Selain itu, pada Webinar Peluang dan Akses Pasar Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan di Amerika Serikat pada 15 Juli 2021, sejumlah produk peternakan Indonesia telah teridentifikasi memiliki peluang yang cukup baik di pasar Amerika Serikat seperti sarang burung walet, madu alam, pupuk hewani atau nabati, yoghurt, daging atau jeroan unggas disiapkan/diawetkan, sosis dan sejenis dari jeroan atau darah.

Khusus peluang ekspor Sarang Burung Walet di Amerika Serikat, saat ini Amerika Serikat merupakan pengimpor nomor lima dunia untuk sarang burung walet, namun pasokan dari Indonesia masih sangat kecil. Eksportir Indonesia dapat memanfaatkan berbagai marketplace besar di AS yang sudah memasarkan SBW, antara lain Amazon dan Cotsco.

AMERIKA SERIKAT

Brief Update Penguatan Kerja Sama Teknis dengan Negara Mitra

Kementerian Pertanian c.q. Biro Kerja Sama Luar Negeri memfasilitasi beberapa kerja sama teknis dan investasi antara Direktorat Jenderal teknis lingkup Kementerian Pertanian dengan negara-negara mitra.

1



AFRIKA SELATAN

Indonesia dan Afrika Selatan telah membahas peningkatan kerja sama teknis antara kedua negara melalui pertemuan antara Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dengan Kedutaan Besar Afrika Selatan.

Pertemuan ini membahas isu-isu yang akan diangkat dalam rencana pertemuan Duta Besar Afrika Selatan dengan Menteri Pertanian RI dan pertemuan Menteri Pertanian Afrika Selatan dengan Menteri Pertanian RI.

Kedua negara ingin memperbaharui MoU kerja sama pertanian sekaligus mengimplementasi area kerja sama dalam MoU tersebut.

Beberapa kerja sama yang akan dibahas, di antaranya teknologi digital pemasaran, keterlibatan petani muda, serta peningkatan kerja sama investasi pertanian kedua negara terkait dengan aturan dan regulasi.

2



HONDURAS

Honduras mengajukan *draft agreement* kerja sama teknis dengan cakupan kerja sama yang terfokus kepada sektor kelapa sawit dan energi terbarukan. Hal tersebut dipandang penting secara politis mengingat Honduras merupakan produsen terbesar kelapa sawit di kawasan Amerika Tengah yang telah mengajukan permohonan bantuan pembangunan sektor kelapa sawit yang rusak akibat badai ETA dan IOTA.

Beberapa bentuk kerja sama yang berpotensi untuk dilakukan segera dengan Honduras adalah *capacity building* dan *exchange of expertise*. Kementerian Pertanian mendukung ketersediaan tenaga ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan usulan program kerja sama dimaksud. Untuk mempercepat terlaksananya kerja sama dimaksud, Kementerian Pertanian mengusulkan untuk mengeksplorasi kemungkinan memasukkan Honduras ke dalam *target beneficiaries* dalam kerangka program kerja sama selatan-selatan dan triangular.

Draft agreement usulan Honduras akan diarahkan menjadi perjanjian payung kerja sama teknis kedua belah pihak yang lebih luas dan bersifat umum. Selanjutnya, kerja sama teknis yang lebih spesifik dapat disusun dalam kerangka kesempatan MoU sektoral.

3



SINGAPURA

Melalui Pertemuan *The 17th Agribusiness Working Groups Indonesia - Singapore*, pada tanggal 26 Agustus 2021, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kerja sama teknis fasilitasi proyek pengembangan pertanian dan ekspor produk pertanian ke Singapura, khususnya produk hortikultura, sesuai dengan KPI 2021 - 2025 yang telah disepakati kedua negara. Kedua pihak telah sepakat untuk mengembangkan Kawasan berikat pertanian di Batam, Bintan, Karimun (BBK), di mana investor Singapura dapat mengembangkan sistem *smart farming* untuk menghasilkan buah, sayuran, dan komoditas pangan lainnya untuk pasar Singapura.

Indonesia berharap investasi dari Singapura dapat tepat sasaran untuk pengembangan pertanian di Batam, Bintan, dan Karimun.

Selain itu, kedua negara meningkatkan kerja sama teknis bidang perkarantina. Kerja sama dimaksud berupa pertukaran informasi perkarantina, implementasi sistem e-certification, serta pelatihan terkait penyakit ikan dan perkarantina ikan. Kedua pihak sepakat untuk melakukan kerja sama implementasi sistem *e-certification* pada tahun 2023 untuk meningkatkan sistem pertukaran dokumen sertifikat ekspor dan impor kedua negara.

4



KOREA SELATAN

Kementerian Pertanian RI dan *Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs* (MAFRA) Korea Selatan sedang dalam pembahasan rencana kerja sama “*Enhancing Millennial Farmers Income by Adopting K-Smart Technologies in Indonesia.*”

Kerja sama ini merupakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendapatan petani milenial dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung selama 5 tahun dengan total dana USD 4,71 juta.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendirikan teknologi pertanian pintar sebagai fasilitas pembelajaran bagi petani, meningkatkan kapasitas petani milenial Indonesia, dan meningkatkan minat petani muda Indonesia untuk terjun dalam bidang pertanian. Selain pembangunan infrastruktur, pelatihan dan workshop internasional akan dilakukan sebagai bagian dari kerja sama.

Kerja sama Kementerian Pertanian RI dan *Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs* (MAFRA) Korea Selatan saat ini sedang dalam proses finalisasi penandatanganan perjanjian kerja sama untuk dapat segera mengimplementasi program kerja sama dimaksud.

5



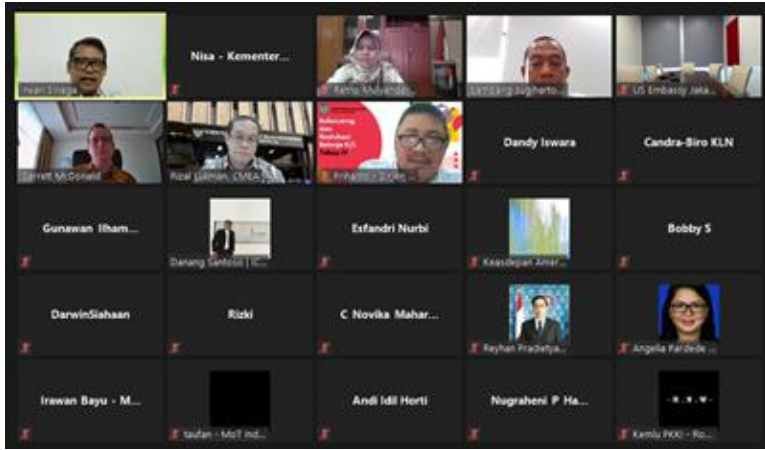
DENMARK

Indonesia dan Denmark sedang dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama (MoU) Pengembangan Susu Organik dalam kerangka kerja sama *business to business Danida Market Development Partnership* (DMDP).

Kerja sama Indonesia – Denmark dalam kerangka DMDP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak melalui pendapatan dari penjualan susu organik segar serta menginisiasi pendirian Peternakan Sapi Perah Organik yang produknya sesuai standar organik nasional maupun internasional sehingga menjadikan produk susu organik yang dihasilkan berpotensi untuk diekspor.

Dana yang dianggarkan dalam kerja sama digunakan untuk konsultasi teknis, operasional dan fasilitasi peralatan serta bangunan. Kerja sama Indonesia–Denmark dalam kerangka DMDP melibatkan lima pihak, yaitu KPSP Setia Kawan sebagai mitra yang akan memproduksi susu organik, PT Indolakto sebagai mitra yang akan mengolah susu organik yang dihasilkan oleh Koperasi, Arla Indofood sebagai mitra yang akan memasarkan susu organik yang telah diproses oleh PT Indolakto, dan Bina Swadaya dan SEGES sebagai konsultan teknis dari pihak Indonesia dan Denmark.

HIGHLIGHTS KERJA SAMA LUAR NEGERI BIDANG PERTANIAN



Pertemuan Bilateral dengan Kedutaan Amerika Serikat terkait Penyelesaian Measure 18 Sengketa WTO DS 478

Dalam rangka upaya penyelesaian kasus sengketa dagang WTO, Pemerintah Indonesia yang diketuai Deputi VII Kemenko Bidang Perekonomian melakukan pertemuan bilateral dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat secara virtual pada tanggal 21 Juli 2021. Pertemuan difokuskan untuk membahas *measure 18* tentang *self-sufficiency* dan amandemen 4 undang-undang melalui UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Pihak Amerika Serikat (AS) menyampaikan apresiasi atas upaya Pemri untuk segera menyelesaikan kasus sengketa DS 478 tersebut. Direktur Jenderal Hortikultura turut hadir untuk menyampaikan *update* RIPH yang telah dikeluarkan Pemri kepada AS dengan total 92ribu ton untuk 72 perusahaan.

Selain membahas penyelesaian kasus sengketa, Pemri juga meminta *update* terkait proposal *market access* untuk komoditas nanas segar asal Indonesia ke AS. Pihak AS menyampaikan proposal tersebut sudah diproses dan sedang menunggu informasi terbaru dari USDA. Pihak AS menyampaikan keinginan untuk meningkatkan perdagangan pertanian dengan Indonesia khususnya pada produk-produk pertanian yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

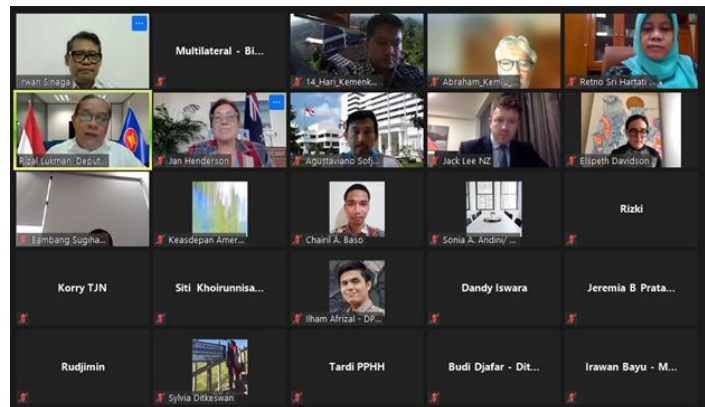
Pertemuan Bilateral dengan Dubes Selandia Baru terkait Penyelesaian Measure 18 Sengketa WTO DS 477

Sebagai lanjutan pertemuan bilateral dalam rangka upaya penyelesaian kasus sengketa dagang WTO, Pemerintah Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Kedubes Selandia Baru secara virtual pada tanggal 23 Juli 2021.

Delegasi RI dipimpin oleh Deputi VII Kemenko Bidang Perekonomian sementara itu delegasi Selandia Baru dipimpin oleh *Chargé d'Affaires* Selandia Baru untuk Indonesia.

Pihak Selandia Baru (SB) menyampaikan apresiasi atas upaya Pemri untuk menyelesaikan kasus sengketa. Sekretaris Ditjen. Hortikultura menyampaikan RIPH yang telah dikeluarkan Indonesia kepada NZ dengan total 146.749 ton untuk 92 perusahaan.

Selain membahas penyelesaian kasus sengketa, Pemri juga meminta *update* terkait *market access* untuk komoditas salak dan manggis asal Indonesia yang masih terbentur isu SPS. Pihak SB menyampaikan perlunya alternatif *treatment* fumigasi dengan "methyl bromade" terhadap salak dan manggis agar bisa memenuhi standar SPS di SB. Selain itu, untuk *market access* buah tropis seperti nanas, pisang, dan mangga asal Indonesia saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan teknis dan *standard* oleh pemerintah SB.





ASEAN-Russia Round Table Discussion on Halal Cooperation

Pertemuan yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 27 Mei 2021 tersebut diantaranya bertujuan untuk berbagi informasi dan meningkatkan pemahaman tentang peraturan pasar halal di kawasan ASEAN dan Rusia dan bertukar pengalaman dan keahlian di bidang sertifikasi halal.

Diskusi menarik tersebut melibatkan perwakilan pemerintahan Negara Anggota ASEAN, lembaga sertifikasi produk halal di ASEAN dan Rusia, para ahli dan pelaku usaha.

Indonesia memaparkan standar halal dan regulasi di Indonesia serta proses sertifikasi halal luar negeri. Badan sertifikasi halal asing yang akan melakukan kerja sama harus memenuhi penilaian kesesuaian, *Mutual Recognition Agreement (MRA)*, registrasi, standar produk impor.

Pertemuan juga menghadirkan para pelaku usaha Rusia yang telah meraih sertifikasi halal di beberapa negara antara lain Damate, SPLAT, United Confectioners, dan Miratorg. Hal ini bertujuan untuk saling memperkenalkan pemasok dan pelanggan produk halal terpercaya untuk pertimbangan kerja sama lebih lanjut. Indonesia menyambut baik inisiatif para pelaku usaha Rusia untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia khususnya di sektor halal untuk barang/jasa serta membuka kesempatan untuk saling bertukar informasi praktik terbaik dan teknologi yang diterapkan.

The 28th Asean Sectoral Working Group on Crops (ASWGC)

Pertemuan ASWGC ke-28 diselenggarakan secara virtual pada tanggal 14 – 15 Juli 2021. Diketahui oleh Thailand, pertemuan dihadiri oleh 10 perwakilan negara Anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Bambang Sugiharto, Direktur PPH Hortikultura.

Ms. Preeyanooch Tippayawat, selaku Ketua pertemuan mengapresiasi kerja keras *Experts Working Groups (EWGs)* dan *Task Force (TFs)* di bawah ASWGC dalam memajukan program aksi sesuai target yang ditentukan.

ASWGC merupakan kelompok kerja ASEAN di bidang tanaman yang mengawal kerja sama ASEAN sub-sektor tanaman. Dalam pertemuan, beberapa dokumen telah disepakati untuk mendapat persetujuan SOM AMAF ke-42 yakni *Intra ASEAN Phytosanitary Guidelines for Importation of Rambutan Fruit* dan *ASEAN Standard for Romaine Lettuce*.

Upaya ASWGC dalam meningkatkan kualitas standar dan harmonisasi di kawasan terlihat dari disepakatinya *Key Deliverables for ASEAN Cooperation on Crops 2022*. Pada akhir pertemuan, Vietnam menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah pertemuan ASWGC ke-29 pada bulan Juni 2022.





Online Training Course on Hydroponic Technology of Vegetable Cultivation

Indonesia menunjukkan komitmennya dalam implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2 on *Zero Hunger* melalui program Kerjasama Selatan-Selatan untuk budidaya sayuran hidroponik. Teknologi hidroponik dipilih sebagai salah satu alternatif untuk dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi budidaya sayuran, serta dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pangan karena dapat ditanam dimanapun tanpa bergantung pada musim dan banyak sumber daya.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji bekerja sama dengan *Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation* (NAM CSSTC) telah melaksanakan Pelatihan Online Budidaya Sayuran Teknologi Hidroponik pada tanggal 27-28 Mei 2021.

Peserta yang berpartisipasi pada pelatihan ini berasal dari penyuluh pertanian, sektor swasta dan akademisi negara-negara kawasan Asia-Pasifik, diantaranya Bangladesh, Cambodia, Fiji, India, Indonesia, Nepal dan Kepulauan Solomon.

Pelatihan ini menjadi sarana pertukaran informasi dan keterampilan budidaya sayuran dengan teknologi hidroponik yang hemat biaya dan adaptif untuk petani skala kecil. Diharapkan keterampilan tersebut dapat mudah direplikasi oleh para petani untuk dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya, serta masyarakat dapat mengakses aneka ragam sayuran bernutrisi tinggi.

Opening online Training Course on Food Labeling and Food Packaging untuk negara Asia Pasifik

Upaya peningkatan pasca panen produk pertanian menjadi fokus dari Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia, tidak hanya di segi pengolahan, tetapi juga segi pelabelan dan pengemasan produk pertanian. Setiap negara memiliki aturan unik untuk pelabelan produk pangannya dan bagi siapapun yang akan mengekspor produk pangannya harus mematuhi peraturan negara tujuan ekspor.

Guna meningkatkan pemahaman tentang pelabelan dan pengemasan produk pangan, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan *Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation* (NAM CSSTC) melaksanakan Pelatihan Online Pelabelan dan Pengemasan Pangan pada tanggal 29-30 Juni 2021.

Peserta yang berpartisipasi sebagian besar adalah wirausahawan produk pangan, akademisi dan pegawai pemerintahan yang berasal dari negara Fiji, India, Indonesia, Kamboja, Kepulauan Solomon, Nepal, Pakistan, dan Timor Leste. Peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam memahami berbagai jenis pengemasan pangan, perbandingan peraturan yang diterapkan beberapa negara dalam pelabelan pangan, serta mendapatkan jaringan kerja untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai perkembangan teknologi dalam pelabelan dan pengemasan pangan.





The 5th Session of the ACD Blueprint Working Group Meeting

Pertemuan dipimpin oleh Iran dan dihadiri negara anggota ACD. Agenda yang dibahas mengenai *draft blueprint* terutama yang terkait pada pilar kerjasama *Promoting Approaches to inclusive and Sustainable Development*.

Adapun isu pertanian masuk ke dalam *draft Blueprint* ke 4 yakni *Interrelation of Food, Energy, and Water Security*. Tujuan dari poin ini diantaranya:

- Memperkuat kapasitas ketahanan pangan dan gizi, efisiensi energi, serta pengelolaan air yang berkelanjutan dan tangguh
- Memastikan akses ke pasokan air, makanan, dan energi yang aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi dan praktik berkelanjutan
- Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- Meningkatkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman terkait transformasi digital dan mempromosikan kemitraan publik-swasta
- Memperkuat kerja sama untuk mengatasi tantangan lingkungan dan kesehatan
- Mempromosikan koordinasi untuk peringatan dan bantuan bencana, termasuk bencana alam, buatan manusia dan sosial
- Memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, mengatasi dampaknya dengan lebih baik dan meningkatkan langkah-langkah untuk mempromosikan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Hasil bahasan Pertemuan ACD ke-5 ini akan menjadi referensi untuk Pertemuan ACD selanjutnya.

De-briefing Reverse Linkage (RL) Project between Indonesia, Islamic Development Bank, and Kyrgyz Republic on the Strengthening of Artificial Insemination of Livestock

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021 dan dihadiri oleh perwakilan FAO, IsDB, Kementerian Pertanian RI serta instansi pelaksana BBIB Singosari dan Bappenas.

Program KSST *Reverse Linkage* antara Indonesia-IsDB-Kyrgyzstan untuk Penguatan Teknologi IB pada Ternak adalah salah satu kisah sukses Indonesia pada KSST. Komitmen KSST *Reverse Linkage* untuk pertanian diwujudkan dengan penandatanganan MoU antara Kementerian Pertanian Indonesia dengan Kementerian Pertanian Kyrgyzstan dan IDB mengenai Penguatan Teknologi IB pada Ternak pada 29 Juli 2015 dengan durasi kerja sama hingga 2017. BBIB Singosari sebagai instansi pelaksana telah berhasil melatih 86 petugas peternakan, teknisi dan peternak dari Kyrgyzstan, mengirimkan tenaga ahli Indonesia ke Kyrgyzstan untuk membangun sistem distribusi semen beku yang efektif dan mengeksport semen beku ternak sapi Kyrgyzstan.

Secara keseluruhan, proyek kerja sama ini telah memberikan manfaat bagi teknisi inseminasi buatan (IB) individu yang terus menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh. Namun, dampak keseluruhan proyek terhadap kapasitas negara untuk merancang dan mengimplementasikan program IB masih perlu dikaji lebih lanjut.





Pertemuan ke-35 International Tripartite Rubber Council

Pertemuan ke-35 *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) telah dilakukan secara virtual pada 21-22 Juni 2021. Sidang diselenggarakan untuk mendiskusikan isu karet alam dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diusulkan pada *ministerial committee meeting* (MCM).

Pertemuan juga membahas perkembangan peembentukan *ASEAN Rubber Council* (ARCo). *International Rubber Consortium Limited* (IRCo) telah mengajukan proposal pembentukan ARCo kepada *ASEAN Secretariat* (ASEC) di Jakarta. ARCo adalah forum diskusi mengenai berbagai isu terkait pembangunan sektor dan industri karet alam meliputi semua sektor di seluruh rantai nilai industri karet alam.

Indonesia menyampaikan rekomendasi bahwa seluruh negara anggota sebaiknya mendapatkan dukungan yang diperlukan dari industri. Selain itu, Indonesia menyarankan Sekretariat untuk berkonsultasi dengan ASEC mengenai hal-hal yang terkait dengan kontribusi anggota atas pembentukan ARCo (jika ada).

Dalam pertemuan, juga disampaikan beberapa laporan kegiatan yang telah dilakukan Thailand, Indonesia, dan Malaysia serta Sekretariat IRCo, yakni 1) perkembangan *rubber fund* untuk program stabilisasi harga karet alam; 2) perkembangan kegiatan peningkatan mutu SDM Sekretariat IRCo; 3) *outcome of the study to evaluate past performance and way forward of itrc and irco by the ad-hoc committee*.

Area yang perlu dipelajari untuk semua rekomendasi dan *way forward* mekanisme dari Komite *Ad-Hoc* ITRC/IRCo yang telah disampaikan dan diputuskan pada pertemuan akan diteliti lebih lanjut sebelum diteruskan ke Pertemuan Komite Menteri (MCM) ITRC sebagai salah satu rekomendasi bersama.

Penandatanganan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Mercy-USA 2021

Kerja sama Kementerian Pertanian RI dengan Mercy-USA dilaksanakan berdasarkan memorandum saling pengertian (MSP) periode 2019 s.d. 2022. Dalam hal ini, pihak Kementan diwakili oleh Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) sebagai pelaksana operasional kerja sama. Keterlibatan beberapa pihak lainnya dalam implementasi kerja sama akan dikawal melalui penjabaran arahan program kerja sama sebagai bagian dari MSP yang berbentuk rencana kegiatan tahunan (RKT).

Dalam pelaksanaan program tanaman pangan, akan dikembangkan pertanian padi organik di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sementara itu, pada pelaksanaan program peternakan, akan dilanjutkan pengembangan agribisnis sapi perah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, serta dilakukan perluasan ke wilayah Sukabumi dan Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pada program kerja sama yang baru dimulai, dilakukan persiapan administrasi awal dan SDM sebelum pelaksanaan. Untuk program yang sudah berjalan, dilakukan evaluasi manajemen pemeliharaan sapi perah dan administrasi keuangan untuk kegiatan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar penyusunan RKT selanjutnya.

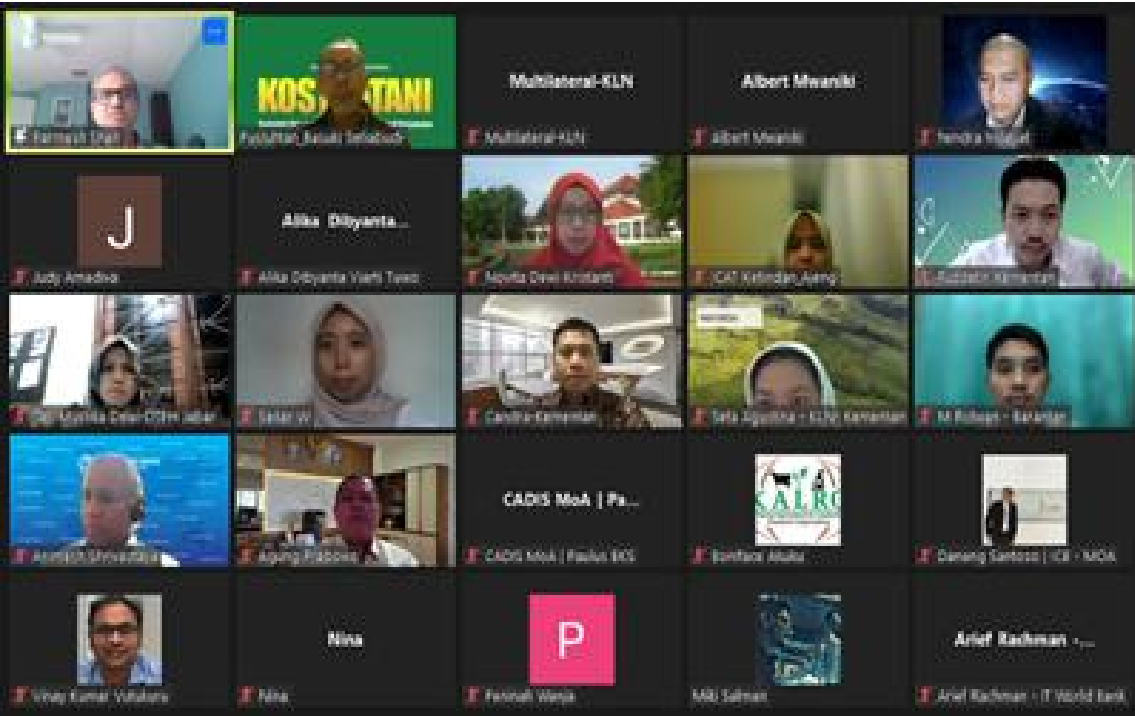
Pada prinsipnya, seluruh pihak yang terlibat mendukung terealisasinya implementasi kerja sama sesuai dengan rancangan yang sudah dijabarkan pada RKT tahun ke-2 implementasi MSP 2019—2022. Oleh karena itu, para pihak sepakat untuk menandatangani RKT yang sudah disusun bersama tersebut. Dokumen RKT ditandatangani oleh *Country Director* Mercy-USA, Sesditjen Tanaman Pangan untuk program tanaman pangan, serta Sesditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk program peternakan pada 30 Juni 2021.





Foto: Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan

KEGIATAN BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI BIDANG PERTANIAN



Workshop Knowledge Exchange Transformasi Pertanian Digital dengan Pemerintah Kenya

Pertemuan virtual Knowledge Exchange Transformasi Pertanian Digital dengan Pemerintah Kenya (25/8/2021)

Workshop Knowledge Exchange Transformasi Pertanian Digital dengan Pemerintah Kenya diselenggarakan atas inisiatif Bank Dunia dengan tujuan melakukan pertukaran pengalaman transformasi pertanian digital melalui pemaparan kebijakan dan perkembangan transformasi pertanian digital antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Irigasi Kenya.

Pertemuan dilaksanakan secara virtual pada tanggal 25 Agustus 2021 dan diikuti oleh 130 peserta. Dalam kesempatan tersebut Kementerian Pertanian RI diwakili Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) memaparkan visi, tantangan, dan upaya transformasi pertanian digital yang telah dilakukan.

Kenya menerapkan transformasi digital di sektor pertanian untuk mengatasi tantangan dari level produsen hingga konsumen dengan menghubungkan petani dan stakeholder terkait dengan teknologi yang sesuai yang akan meningkatkan inovasi di sektor pertanian berdasarkan *data-driven*.

Kenya memiliki kebijakan *10-years Agricultural Sector Transformation and Strategy (ASTGS)*. Dalam implementasi kebijakan tersebut, pemerintah pusat di Kenya berperan dalam mendesain instrumen kebijakan, sementara pemerintah daerah (*county*) bertanggung jawab dalam melaksanakan implementasi di lapangan.

Faktor kesuksesan lainnya pada transformasi pertanian digital di Kenya adalah kebijakan untuk menyediakan data pertanian sebagai *public goods*. Kebijakan tersebut telah mendorong keterlibatan *private sector* melalui *Big Data Platform* yang disebut *Kenya Unified Agriculture Data Platform*. *Private sector* yang terlibat tidak hanya berfungsi sebagai *provider* teknologi, namun juga *trader*, *startup*, serta penyedia jasa logistik.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, Bank Dunia menawarkan pertemuan lanjutan dengan pembahasan teknis meningkat tingginya minat peserta terkait upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kenya dalam melakukan transformasi sektor pertanian.

HIGHLIGHTS KESEPAKATAN KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2021

the Federal Agency for the Safety of the Food Chain of the Kingdom of Belgium

Letter of Intent concerning Strengthening the Bilateral Agricultural Cooperation in the Fields of "Quality and Safety of Animal Health".



BRUSSELS
20 SEPTEMBER 2021

FLORENCE
17 SEPTEMBER 2021



the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of the Kingdom of the Netherlands

Letter of Intent concerning Join Facilitation for Strengthening Cooperation on Agriculture.

the Embassy of the Russian Federation to Indonesia

Letter of Intent concerning Join Facilitation for Strengthening Cooperation on Agriculture Sector



JAKARTA
10 JUNI 2021

JAKARTA
7 APRIL 2021



Food and Agriculture Organization (FAO)

Kesepakatan Kerja Sama Technical Cooperation Programme (TCP) FAO - Kementan RI terkait "Strengthening Digital Agricultural Monitoring Capacities Using e-Agriculture"

Sustainable Spices Indonesia (SSI)

Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Komoditas Rempah dan Tanaman Obat secara Berkelanjutan dalam Mendukung Ekspor



JAKARTA
23 MARET 2021

JAKARTA
17 FEBRUARI 2021



Microsoft Indonesia

Nota Kesepahaman tentang Penguatan Ekosistem Digital Pertanian

AGENDA KERJA SAMA LUAR NEGERI (SEPT-DES 2021)

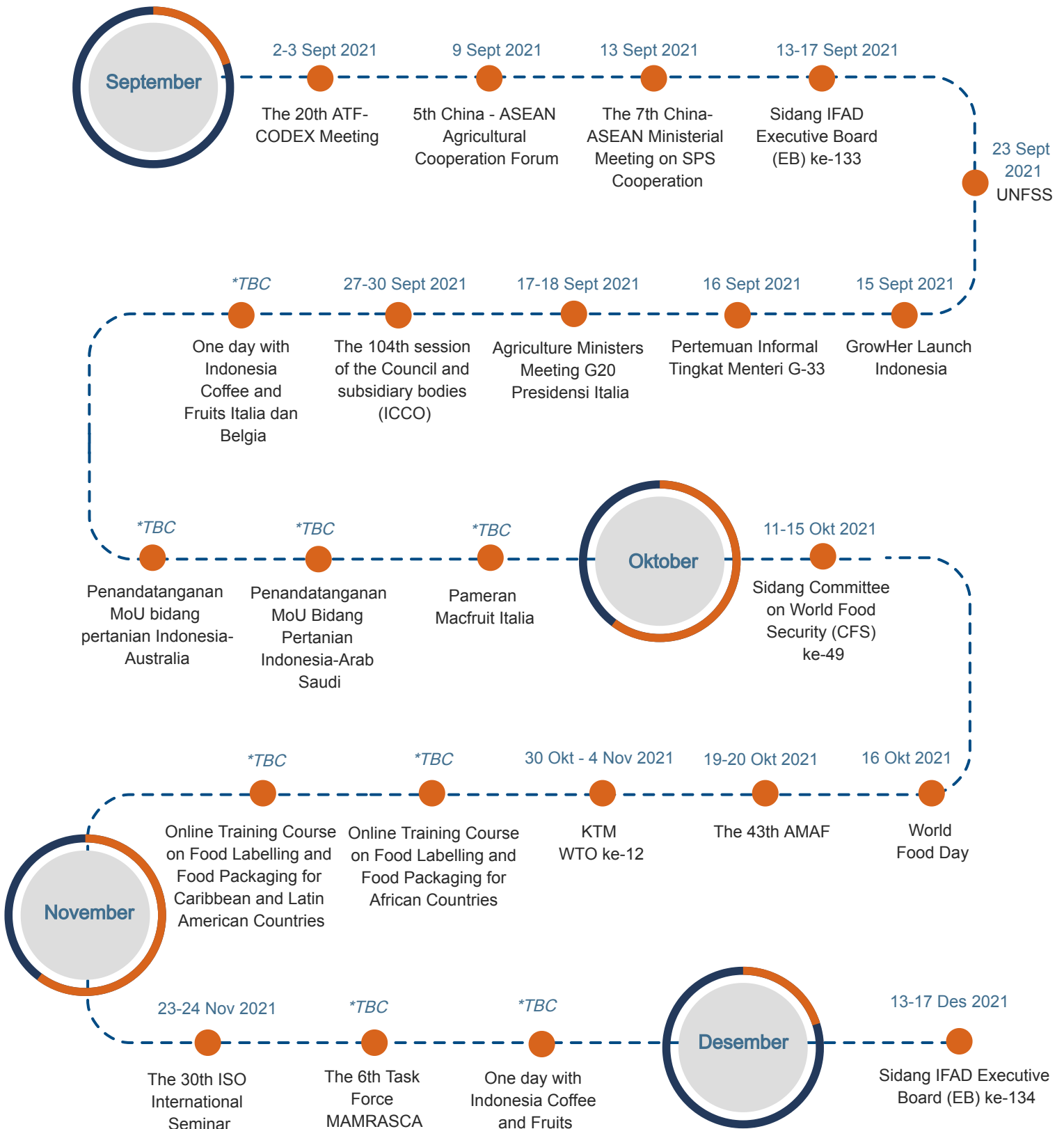




Foto: Pat Whelen via unsplash



Tim Redaksi Buletin

Diplomasi

Biro Kerja Sama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3, Gedung A Lt. 6
Ragunan, Jaksel 12550
email: publikasi.kln@gmail.com
www.pertanian.go.id